



ANALISIS KEBIJAKAN JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAUR

Deki Sepramadi • Rahiman Dani• Henny Aprianty

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan jabatan Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur dengan menggunakan model Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam mendukung program pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan KB tidak memiliki kebijakan jabatan yang besar dalam memutuskan sebuah keputusan, namun demikian dari kebijakan dari atasan ke penyuluhan KB kegiatan penyuluhan berjalan dengan baik pada penelitian ini terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yaitu suasana politik mengakibatkan pergantian pimpinan dilanjutkan perubahan kebijakan yang ada.

Kata Kunci: *Kebijakan; Jabatan; Sumberdaya Penyuluhan.*

©2024 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

PENDAHULUAN

Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Tesya Mulianda & Yohana Gultom, 2019). Program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat terkait perencanaan keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas Tuharea et al. (Lestari

Correspondence Author

Henny Aprianty

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Email : henny@unihaz.ac.id



et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, peran tenaga penyuluhan keluarga berencana sangat vital (Marliati et al., 2008). Mereka adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan edukasi, informasi, dan layanan terkait program KB. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada efektivitas dan efisiensi kinerja penyuluhan KB. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang mengatur jabatan penyuluhan KB mendukung dan memfasilitasi tugas serta tanggung jawab mereka (Zuhriyah et al., 2017).

Kabupaten Kaur, sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk mendukung program KB, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A), telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukung tugas penyuluhan KB. Namun, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan sumber daya manusia, dukungan anggaran, dan resistensi budaya di masyarakat. Berikut adalah tabel Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2021-2022. Informasi ini penting untuk memahami tren dan efektivitas program KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan reproduksi masyarakat. Melalui data ini, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu diperkuat untuk mencapai target program KB yang lebih baik di masa depan.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi Bengkulu

Wilayah	Jumlah Pasangan Usia Subur	
	2021	2022
Provinsi Bengkulu	369.244	369.244
Bengkulu Selatan	29.286	29.286
Rejang Lebong	49.744	49.744
Bengkulu Utara	56.138	56.138
Kaur	29.189	29.189
Seluma	41.307	41.307
Mukomuko	39.123	39.123
Lebong	19.867	19.867
Kepahiang	31.560	31.560
Bengkulu Tengah	24.271	24.271
Kota Bengkulu	48.759	48.759

Suber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu data 13 Juni 203

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Kaur berjumlah 29.189 jiwa, maka dari itu perlunya peran penyuluhan KB dalam menangani jumlah pertumbuhan penduduk dengan memberikan program KB dan tidak hanya membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Implementasi yang efektif dari program ini akan memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Selain itu, kebijakan jabatan penyuluh KB seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam hal pengembangan kapasitas, kesejahteraan, dan motivasi kerja penyuluh (Arifin Miftakhul, 2015). Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja dan efektivitas penyuluh dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan jabatan penyuluh KB menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mendukung dan memperkuat peran penyuluh KB dalam mencapai tujuan program KB (Lestari et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan meneliti secara mendalam terkait “Analisis Kebijakan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur”. pemilihan topik ini didasarkan pada pengalaman dan data awal yang di dapat dilapangan sehubungan dengan kendala yang dirasakan selama Implementasi Kebijakan berlangsung. Disamping itu yang menjadi pertimbangan peneliti bahwa penelitian ini juga masih masuk dalam kajian ilmu administrasi publik.

METODOLOGI

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono dalam (Purnawan, 2021)). Penelitian ini bermaksud menyajikan data secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan (Hadari Nawawi, 1991). Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kebijakan jabatan penyuluh keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur.

Hasil penelitian akan menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari objek penelitian, dan perilakunya dapat diamati (Abdullah, 2015). Data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian ditarik kesimpulan (Creswell & Poth, 2016).

Untuk melakukan Analisis Kebijakan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur, dengan menggunakan beberapa instrumen penelitian yang dapat membantu mengumpulkan dan menganalisis data secara efektif. Berikut adalah beberapa instrumen penelitian yang dapat digunakan:

Tabel 1.2 Intrumen Penelitian

Aspek Yang Diteliti	Indikator	Teknik Pengumpulan Data
---------------------	-----------	-------------------------

Implementasi Kebijakan jabatan Penyuuh KB Teori George Edward III (Rikiyatun et al., 2023)		
Komunikasi	Tranmisi Kejelasan Konsistensi	Wawancara
Sumber Daya	Staf Informasi Wewenang Fasilitas	Wawancara
Dispoisi	Pengangkatan Insetif	Wawancara
Struktur Birokrasi	Standard Operational Procedure (SOP) Fragmentasi	Wawancara
Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Penyuluhan KB Teori Stimulus-Respons (S-R)		
Stimulus-Respons	Perubahan Prilaku Respon Cepata atau Lambat Konsitensi Respon	Wawancara
Faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Penyuluhan KB Teori George C. Edward III dan Mazmanian & Sabatier (Rikiyatun et al., 2023)		
Faktor Pendukung Dan Penghambat	Komunikasi Sumber Daya Struktur Birokrasi Lingkungan Kebijakan	Wawancara

PEMBAHASAN HASIL

A. Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi

Tanggapan Berdasarkan tanggapan dari semua informan yang terlibat dalam wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi mengenai kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di masyarakat pada umumnya dilakukan melalui penyuluhan langsung yang dilakukan di tingkat desa. Metode ini dianggap efektif karena memungkinkan penyuluhan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai program KB secara rinci. Meskipun komunikasi tersebut dapat dianggap cukup jelas dan konsisten, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat menerima informasi yang sama secara merata, mengingat perbedaan tingkat pemahaman dan akses informasi di setiap daerah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa meskipun penyuluhan langsung masih menjadi metode utama, ada harapan agar informasi mengenai kebijakan KB dapat disampaikan lebih sering dan melalui berbagai saluran komunikasi lainnya, seperti media sosial, agar bisa



menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini dianggap penting mengingat perkembangan teknologi dan semakin banyaknya masyarakat yang aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Meskipun demikian, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penyebaran informasi secara merata, baik dari sisi akses maupun tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda, secara keseluruhan baik informan maupun masyarakat merasa bahwa komunikasi yang diterima dan disampaikan oleh penyuluhan KB cukup konsisten dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ada.

2. Sumber Daya

Tanggapan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di masyarakat berjalan cukup efektif, dengan komunikasi yang dilakukan melalui penyuluhan langsung di tingkat desa. Metode ini memungkinkan interaksi yang lebih personal antara penyuluhan dan masyarakat, meskipun tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan informasi disebarluaskan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, mengingat adanya perbedaan dalam tingkat pemahaman dan akses informasi. Beberapa informan mengusulkan agar informasi mengenai kebijakan KB juga disampaikan lebih sering melalui saluran komunikasi tambahan, seperti media sosial, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, sumber daya informasi dalam pelaksanaan kebijakan Penyuluhan KB cukup mendukung kelancaran program tersebut. Penyuluhan KB mendapatkan materi yang relevan dan mudah dipahami, serta pelatihan rutin yang memastikan mereka selalu memiliki pengetahuan yang up-to-date. Wewenang dalam pengelolaan sumber daya, seperti distribusi materi dan pelatihan, sebagian besar berada di tangan Dinas, sementara penyuluhan KB diberikan kebebasan dalam pendekatan penyuluhan yang mereka pilih di lapangan. Masyarakat mengapresiasi keberadaan penyuluhan yang terlatih dengan baik dan selalu menyampaikan informasi yang akurat.

Fasilitas yang disediakan juga cukup memadai, seperti materi penyuluhan, alat bantu visual, dan perangkat teknologi yang mendukung penyuluhan lebih interaktif. Namun, tantangan masih ada terkait akses internet di daerah pedalaman dan transportasi ke wilayah yang sulit dijangkau. Meskipun demikian, masyarakat merasa terbantu dengan fasilitas yang ada karena memudahkan mereka dalam memahami informasi terkait program KB. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan, baik dari sisi distribusi informasi, akses fasilitas, dan kendala teknis lainnya, implementasi kebijakan penyuluhan KB di Kabupaten Kaur dapat dikatakan cukup efektif dan telah mendapat apresiasi baik dari masyarakat maupun pihak terkait lainnya.

3. Disposisi

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa disposisi pengangkatan jabatan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur dilakukan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis pada kebutuhan daerah. Proses seleksi melibatkan kriteria pendidikan, pengalaman, serta kemampuan penyuluhan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Pengangkatan jabatan dilakukan dengan memperhatikan kecocokan antara lokasi penempatan



dan kapasitas serta keahlian penyuluhan. Setelah seleksi, penyuluhan mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan diri sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Masyarakat memberikan respons positif terhadap pengangkatan penyuluhan karena mereka merasa penyuluhan yang ditugaskan memiliki kompetensi yang baik dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, insentif yang diberikan kepada penyuluhan KB memiliki peran penting dalam memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik. Meskipun insentif sudah diberikan, baik dalam bentuk insentif tetap maupun tambahan berdasarkan pencapaian, banyak penyuluhan dan masyarakat merasa bahwa insentif yang ada masih perlu ditingkatkan, mengingat tantangan yang dihadapi, terutama terkait biaya transportasi dan operasional. Beberapa penyuluhan berharap agar insentif lebih disesuaikan dengan beban kerja dan jarak yang ditempuh, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas tanpa harus terbebani oleh biaya tambahan. Masyarakat pun mendukung peningkatan insentif untuk memaksimalkan kinerja penyuluhan dalam melaksanakan tugas penyuluhan KB.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Operating Procedures (SOP) dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) memegang peran yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan program. SOP memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan tahapan yang harus diikuti oleh penyuluhan KB, sehingga memastikan setiap kegiatan penyuluhan dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Para penyuluhan, baik di tingkat dinas maupun di lapangan, sangat menghargai adanya SOP karena memberikan arah yang jelas dalam menjalankan tugas mereka. Masyarakat juga merasakan manfaat dari pelaksanaan SOP, karena penyuluhan yang datang membawa informasi yang jelas dan cara penyuluhan yang terorganisir dengan baik.

Selain itu, fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam struktur birokrasi implementasi kebijakan penyuluhan KB telah diatur dengan cukup jelas. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari kepala dinas, penata KB, penyuluhan KB, hingga masyarakat, memiliki pemahaman yang baik tentang peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Meskipun masih ada tantangan dalam hal sumber daya dan koordinasi, secara keseluruhan tanggung jawab sudah terdistribusi dengan jelas. Penyuluhan KB memegang peran sentral dalam melaksanakan program di lapangan, sementara penata KB dan kepala dinas lebih fokus pada perencanaan, pemantauan, dan pengawasan kebijakan. Masyarakat juga merasakan manfaat dari pembagian tugas yang jelas, dengan penyuluhan menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan KB di lapangan.

B. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur menunjukkan adanya pemahaman dan penerimaan yang cukup baik terhadap program tersebut. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka merasa lebih terbantu setelah mendapatkan informasi dan edukasi mengenai KB melalui penyuluhan.



Masyarakat merasa bahwa penyuluhan KB tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka, yang menjadikan komunikasi lebih terbuka dan dua arah.

Namun, ada juga beberapa kendala yang dihadapi masyarakat, seperti ketidakpastian jadwal penyuluhan atau kurangnya akses informasi yang terus menerus, terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor politik dan perubahan pemerintahan juga disebutkan sebagai hal yang bisa mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program KB, karena seringkali terjadi perubahan dalam alokasi anggaran atau prioritas kebijakan yang memengaruhi kontinuitas penyuluhan.

Meskipun demikian, banyak masyarakat yang merasa program ini tetap memberikan dampak positif bagi mereka, terutama dalam hal peningkatan pemahaman tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan yang dihadapi, masyarakat mengakui bahwa kebijakan penyuluhan KB memberikan manfaat yang jelas, dan mereka mengharapkan kebijakan ini dapat dilanjutkan dengan lebih baik di masa depan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Komunikasi

Komunikasi yang efektif dalam implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur terbukti memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Pendekatan komunikasi yang digunakan oleh penyuluhan KB bersifat dua arah, di mana selain memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, penyuluhan juga aktif mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Ini membantu membangun hubungan saling percaya dan memastikan bahwa masyarakat merasa dihargai serta memiliki peran dalam proses tersebut.

Meski demikian, komunikasi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakpastian jadwal penyuluhan dan kesulitan dalam menjangkau masyarakat di daerah yang sangat terpencil. Namun, secara keseluruhan, pendekatan komunikasi yang inklusif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penyuluhan KB di Kabupaten Kaur.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, terutama para penyuluhan KB yang berperan langsung dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Penyuluhan KB yang terlatih dan memiliki pemahaman mendalam mengenai perencanaan keluarga mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada masyarakat.

Selain itu, dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penunjang yang penting untuk kelancaran penyuluhan. Anggaran yang cukup memungkinkan penyuluhan untuk melaksanakan kegiatan secara optimal, seperti penyuluhan langsung, distribusi



materi informasi, serta pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan program.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur. Adanya pembagian tugas yang jelas antarinstansi dan antara berbagai level pemerintahan memungkinkan koordinasi yang efektif dalam menjalankan program ini. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai lembaga pengelola utama memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan kelancaran kebijakan, sementara penyuluhan KB di tingkat lapangan berfungsi sebagai ujung tombak penyuluhan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, struktur birokrasi yang ada terbukti memberikan landasan yang kuat untuk keberhasilan implementasi kebijakan penyuluhan KB. Peningkatan efisiensi dalam proses administrasi dan penguatan koordinasi antarinstansi akan semakin memperlancar pelaksanaan kebijakan ini dan mencapai hasil yang lebih optimal.

4. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor politik dapat menjadi penghambat signifikan dalam implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur. Faktor politik, seperti perubahan kepemimpinan daerah, pergeseran prioritas kebijakan, dan ketidakstabilan dalam alokasi anggaran, sering kali mempengaruhi kelangsungan dan efektivitas program ini. Perubahan dalam kebijakan pemerintah yang terjadi secara mendadak atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menyebabkan penundaan atau ketidakteraturan dalam pelaksanaan penyuluhan.

Selain itu, dalam lingkungan kebijakan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ada kalanya kebijakan penyuluhan KB tidak mendapatkan perhatian penuh dari pihak-pihak yang berwenang, karena dipengaruhi oleh kebijakan politik yang lebih besar atau lebih mendesak. Ketidakpastian politik ini bisa mengganggu kontinuitas program dan merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari penyuluhan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kaur dapat dikatakan berjalan dengan baik. Kebijakan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penyuluhan KB, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Koordinasi yang baik antarinstansi dan pemangku kebijakan penting untuk memastikan keberhasilan program. Pada Implementasi kebijakan ini

bahwa penyuluhan KB tidak memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, penyuluhan KB hanya mengikuti kebijakan yang ada.

2. Respon Masyarakat

Respon masyarakat terhadap kebijakan penyuluhan KB di Kabupaten Kaur sebagian besar positif. Masyarakat merasa bahwa penyuluhan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Meskipun ada beberapa kendala, seperti keterbatasan akses informasi di daerah terpencil, masyarakat secara umum menganggap kebijakan ini penting dan memberikan dampak positif bagi mereka. Program KB diharapkan dapat diteruskan dan diperbaiki agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyuluhan KB yang berkompeten. Namun, terdapat juga faktor penghambat yang perlu diperhatikan, seperti faktor politik, yang sering mengganggu kontinuitas program. Selain itu, kurangnya akses informasi bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, juga menjadi hambatan yang perlu ditangani. Upaya untuk meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki sistem koordinasi antarinstansi, dan memastikan keberlanjutan kebijakan dapat mengurangi hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). METODE PENELITIAN KUANTITATIF. In *Aswaja Pressindo* (1st ed.). Aswaja Pressindo.
- Arifin Miftakhul. (2015). ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PETANI TERHADAP KINERJA PELAYANAN PENYULUH PERTANIAN (Studi Kasus di BP3K Kalibawang, Kab. Kulon Progo, D.I. Yogyakarta). *Agrica Ekstensia*, 9(1), 40–49.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Lestari, N., Noor, M. S., & Armanza, F. (2021). Literature Review : Hubungan Dukungan Suami Dan Tenaga Kesehatan Dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). *Homeostasis*, 4(2), 447–460.
- Marliati, M., Sumardjo, S., Asngari, P. S., Tjitropranoto, P., & Saefuddin, A. (2008). FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENINGKATAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI (Kasus di Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Jurnal Penyuluhan*, 4(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i2.2174>
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia*. 06(1), 1–9.
- Rikiatun, R., Budiarto, G., & Martina. (2023). Implementasi Kebijakan Pemanduan Kapal di PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Palembang. *PESIRAH: Jurnal*



- Administrasi Publik*, 1(2), 26–32. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i2.21>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.Bandung:Alfabeta. In *Bandung:Alfabeta*. (p. 118).
- Tesya Mulianda, R., & Yohana Gultom, D. (2019). Pengaruh Pemberian Konseling Kb Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkj) Di Kelurahan Belawan Bahagia Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda*, 5(2), 55–58. <https://doi.org/10.52943/jikebi.v5i2.167>
- Zuhriyah, A., Indarjo, S., & Budi, B. R. (2017). Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efek-Tivitas Program Keluarga Berencana. *Jurnal Higeia*, 1(4), 1–13. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>